



**Arahan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi  
Pada Sosialisasi Konsep, Implementasi dan Pengukuran  
Keberhasilan Reformasi Birokrasi  
lingkup Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi**

- Yang saya hormati Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Yang Saya Hormati Sekretaris Badan dan Kepala Pusat Litbang serta Kepala Balai Besar Litbang lingkup Badan Litbang dan Inovasi;
- Yang saya Hormati Kepala Balai Litbang, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV lingkup Badan Litbang dan Inovasi.

Assalamu alaikum warohmatullohi wa barakatuh...

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua...

Marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang atas berkah dan rahmat-Nya lah kita semua dapat bersama-sama mengikuti acara yang penting ini,

yaitu Sosialisasi Konsep, Implementasi dan Pengukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi lingkup Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Saudara-saudara yang saya hormati dan banggakan....

Saat ini, tidak hanya kita di Indonesia, tapi seluruh masyarakat dunia sedang menghadapi suatu kondisi yang sepenuhnya akan mengubah cara hidup kita. Dimulai dari Kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina, suatu wabah yang disebabkan oleh virus yang dikenal sebagai Novel Corona Virus menyebar secara global. Hampir tidak ada satupun teritori berdaulat (negara) yang terbebas dari COVID-19 (Corona Virus Disease -19), penyakit yang disebabkan oleh Novel Corona Virus tersebut. Jutaan orang terpapar, sebagian masih dalam perawatan dan tidak sedikit yang berpulang ke rahmatullah.

Saudara-saudara sekalian...

Mengapa pada awal arahan saya ini saya mengangkat permasalahan terkait Covid-19? Permasalahan Covid-19 dan tentunya bersama banyak permasalahan lain semakin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Negara (dalam konteks ini dimaknai sebagai Birokrasi pemerintah beserta seluruh aparatur dan kelembagaannya) harus semakin hadir, dan bersama-sama masyarakat mengatasi dan menanggulangi semua permasalahan hidup bernegara. Permasalahan dimaksud bersifat multi dimensi (ideologi, politik, sosial, ekonomi dan budaya) dan seakan-akan tiada habisnya, seiring dengan dinamika zaman yang terus bergerak maju. Dalam kondisi sebelum hadirnya Covid-19 saja, masyarakat menaruh harapan yang sangat tinggi

kepada Negara untuk dapat menjalankan fungsinya seoptimal mungkin, baik sebagai regulator, pembuat kebijakan lebih-lebih dalam fungsi pelayanan publik.

Sudah kita maklumi bersama, akibat tingginya harapan masyarakat, namun di sisi lain Negara belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan tersebut maka timbul stigma berupa anggapan bahwa Negara belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan baik. Belum lagi adanya perilaku oknum pejabat publik yang masih memperlihatkan perilaku negatif (KKN) yang menambah suram pandangan masyarakat terhadap birokrasi negara.

Saudara-saudara sekalian....

Untuk mengubah pandangan masyarakat yang stigmatik tersebut, tentu bukan hal yang mudah atau semudah seperti membalik telapak tangan, dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan membutuhkan waktu yang panjang. Namun bukan berarti tidak ada upaya sama sekali yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki tidak hanya citra Negara dihadapan publik, tapi sekaligus benar-benar menjawab dan memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Pemerintah pasca Reformasi sudah menerapkan suatu kebijakan yang ditujukan untuk mengubah wajah birokrasi. Tujuannya tidak bersifat jangka pendek, prosesnya berlangsung secara gradual dan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapai. Melalui Program Reformasi Birokrasi yang dikomandani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Pemerintah ingin mendorong profil birokrasi

Indonesia, baik Pusat maupun Daerah tidak hanya menjadi birokrasi yang “bersih, tanggap dan melayani”, namun lebih jauh menjadi “Birokrasi Berkelas Dunia”. Jargon “berkelas dunia” ini bukan tidak ada fakta atau rujukannya, salah satu yang paling dekat adalah tetangga kita di lingkungan ASEAN, yaitu Singapura. Walaupun tidak dapat dibandingkan secara *apple to apple* karena luasan, jumlah penduduk dan kompleksitas dalam kelola wilayah, namun Singapura dikenal memiliki birokrasi yang sangat efisien, tanggap terhadap perubahan, didukung oleh infrastruktur IT dan SDM yang kuat sehingga mampu menyulap profil negaranya yang sebelumnya dianggap terbelakang, saat ini menjadi salah satu Negara yang menjadi jangkar (*anchor*) dari entitas bisnis global yang ingin menancapkan kukunya di wilayah ASEAN. Tetangga kita lainnya di luar ASEAN adalah Korea Selatan, yang memiliki birokrasi yang tidak kalah efisien sehingga pembangunan birokrasinya mulai menjadi rujukan bagi negara-negara berkembang yang ingin membangun birokrasi pemerintahan yang tangguh.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia....

Sejak dicanangkannya Reformasi Birokrasi bagi instansi-instansi Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, sampai sejauh ini perubahan wajah birokrasi kita nampaknya belum lagi terlihat menggembirakan. Stigma masyarakat terhadap Birokrasi pemerintahan kita belum sepenuhnya berubah. Walaupun di sana-sini kita melihat mulai banyak inovasi dikembangkan terutama dalam aspek pelayanan publik.

Tolok ukur seperti *Global Competitiveness Index* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* berdasarkan *Global Competitiveness Report* pada tahun 2019 masih menempatkan Indonesia pada urutan ke-50 dengan skor 64,6. Di lingkungan ASEAN beberapa negara tetangga kita berada di urutan yang lebih baik yaitu Singapura (1), Malaysia (27) dan Thailand (40). *Global Competitiveness Index* mengukur dua belas indikator, beberapa diantaranya sangat berkaitan erat dengan birokrasi yaitu aspek kelembagaan, kerangka makro ekonomi yang stabil, kondisi tingkat kesehatan dan pendidikan dasar serta tingkat inovasi. Indikator lain untuk menilai tingkat competitiveness suatu negara di level global adalah *Corruption Perception Index*, yang pada tahun 2019 masih menempatkan Indonesia pada urutan ke-85 dari 179 negara. Lagi-lagi negara tetangga kita di kawasan ASEAN yaitu Singapura (4), Brunei (35) dan Malaysia (50) posisinya lebih baik dari negara kita. Posisis negara kita dalam kedua tolok ukur yang diakui oleh masyarakat internasional tersebut tentu saja mengajak kita untuk melakukan pembenahan yang serius dan menyeluruh terutama dalam aspek birokrasi pemerintahan yang menjadi *back bone* dalam menggerakkan seluruh potensi bangsa untuk bergerak kearah yang lebih baik.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang berbahagia....

Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi pada instansi Pemerintah dan juga belum sepenuhnya dirasakannya dampak dari Reformasi Birokrasi tersebut oleh masyarakat tentu saja harus dicari akar penyebabnya. Salah satu hal yang ditengarai sebagai penyebab belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi adalah belum

tersosialisasikannya konsep serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Reformasi Birokrasi kepada seluruh ASN. Satu hal lagi, Reformasi Birokrasi bahkan seringkali dianggap hanya sebagai alat untuk menaikkan prosentase kenaikan Tunjangan Kinerja (Tunkin) PNS, bukan seperangkat nilai dan prosedur untuk memperbaiki profil Birokrasi kita. Sebagai Kepala Badan Litbang dan Inovasi, saya tentu saja tidak ingin insan litbang menjadi bagian dari permasalahan seperti tersebut di atas, namun sebaliknya saya ingin insan Badan Litbang dan Inovasi menjadi bagian dari solusi dalam perbaikan Birokrasi kita.

Dalam upaya Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi, tentu saja yang perlu pertama kali dilakukan adalah penguatan dasar yaitu dengan penanaman pemahaman terhadap nilai dan perangkat Reformasi Birokrasi kepada seluruh anggota Organisasi. Cara pandang yang salah sebagaimana dikemukakan di atas tentu saja harus kita buang jauh-jauh dari benak kita semua. Mulai hari ini, setelah sosialisasi ini, saya berharap kita semua memiliki pemahaman yang benar dan seragam mengenai Reformasi Birokrasi dan pada gilirannya menjadi salah satu aktor kunci yang dapat mensukseskan agenda Reformasi Birokrasi Nasional.

Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia.....

Pada hari ini kita semua akan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Ibu Naptalina Sipayung, SH., MAP. Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai konsep Reformasi Birokrasi

beserta penerapan dan pengukuran implementasinya. Kami semua berharap paparan yang disampaikan akan membangun pemahaman kami semua akan arti penting Reformasi Birokrasi sebagai salah satu upaya dalam mendorong kehidupan bernegara yang lebih baik dan membuat bangsa kita semakin kompetitif di dalam kancah persaingan global. Sebelum paparan oleh Ibu Aseisten Deputi, terlebih dahulu akan disampaikan paparan mengenai strategi dan pencapaian Badan Litbang dan Inovasi di dalam Reformasi Birokrasi.

Akhirul kalam, saya sampaikan selamat mengikuti sosialisasi Konsep, Implementasi dan Pengukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi lingkup Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan bimbingan-Nya agar kita semua, melalui sosialisasi ini, menjadi solusi bagi penguatan Reformasi Birokrasi ke depan.

Demikian yang dapat saya sampaikan, wassalamu alaikum, warrohmatullohi wa bawakatuuh...

Kepala Badan,

Dr. Ir. Agus Justianto, MSc.